

Implementation Of Healthy Latrine Sanitation Program In Sumorame Village

[Implementasi Program Sanitasi Jamban Sehat Di Desa Sumorame]

Silda Labibi¹⁾, Hendra Sukmana^{*,2)}

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract. *This study examines the implementation of the Healthy Latrine Sanitation Program in Sumorame Village, Sidoarjo, which aims to improve community health and environmental sanitation. The problem addressed is the limited access to proper sanitation facilities and the persistence of open defecation practices. This research employs a qualitative descriptive method through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the program implementation is influenced by six key variables based on Van Meter and Van Horn's policy implementation theory, including clear objectives, adequate resources, competent implementing agencies, effective communication, positive implementer attitudes, and supportive socio-economic conditions. The program has successfully improved sanitation access and community awareness, although challenges such as limited budget and perceived inequality remain. In conclusion, the program contributes positively to public health and supports sustainable development goals, particularly in improving sanitation access and quality of life.*

Keywords - *Implementation, Sanitation, Healthy Latrine, Community Participation.*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Sanitasi Jamban Sehat di Desa Sumorame, Sidoarjo, dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Permasalahan yang diangkat adalah keterbatasan akses sanitasi layak serta masih adanya praktik buang air besar sembarangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program dipengaruhi oleh enam variabel menurut teori Van Meter dan Van Horn, yaitu kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi, sikap pelaksana, serta kondisi sosial ekonomi. Program ini berhasil meningkatkan akses sanitasi dan kesadaran masyarakat, meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan persepsi ketidakmerataan. Kesimpulannya, program memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat serta mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.*

Kata Kunci - *Implementasi, Sanitasi, Jamban Sehat, Partisipasi Masyarakat*

I. PENDAHULUAN

Program sanitasi di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Beberapa inisiatif utama dalam program ini meliputi, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang Pendekatan Lima Pilarnya Mencakup melarang membuang air besar sembarangan atau disingkat (SBS), mencuci tangan menggunakan sabun (CTPS), mengelola air minum dan makanan yang ada di rumah tangga agar bersih (PAMM-RT), mengelola sampah yang berasal dari rumah tangga (PS-RT), dan mengelola limbah yang berasal dari rumah tangga seperti halnya limbah cair (PLC-RT). Hal tersebut dilakukan dengan kerjasama melalui masyarakat dengan melakukan perencanaan, memelihara fasilitas sanitasi, dan melakukan pelaksanaan. Kemudian program kedua yaitu melakukan program percepatan pembangunan sanitasi (PPSP) dengan fokus utama yaitu membangun di area pemukiman baik itu pemukiman yang padat penduduknya maupun tidak. Program ini dijalankan dengan bekerjasama melalui lembaga pemerintah setempat, kementerian, dan seluruh masyarakat. Selain itu ada juga program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau (PAMSIMAS), yang nantinya akan menyediakan air bersih serta fasilitas sanitasi agar kesehatan masyarakat dapat meningkat. Berjalannya program ini nantinya akan dapat mengedukasi masyarakat akan pentingnya air bersih serta sanitasi yang baik. Program ini juga selaras dengan sustainable development goals (SDGs) nomor 6 yang bertujuan memberikan akses air bersih dan sanitasi kepada seluruh masyarakat pada tahun 2030. Program ini sejalan dengan komitmen global untuk meningkatkan kualitas hidup melalui sanitasi yang layak. Mendorong investasi dari sektor swasta dan penerapan teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan sanitasi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi penyakit yang ditularkan melalui air, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pada tahun 2030, dunia bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi yang memadai untuk semua dan mengakhiri larangan buang air besar sembarangan (ODF) sebagai salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan keenam (Yulinawati & Purwaningrum, 2021). Namun, tujuan kesehatan nasional pada tahun 2024 adalah mencapai peningkatan akses terhadap layanan air minum, sanitasi yang memadai dan berkelanjutan, serta promosi dan pemberdayaan kesehatan di seluruh masyarakat (Primana, 2021). Kesehatan merupakan hak fundamental setiap individu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kesehatan lingkungan, termasuk sanitasi yang layak, memegang peranan penting dalam upaya mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan adalah melalui penyediaan fasilitas sanitasi yang layak dan memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi dan program, salah satunya adalah Program Jamban Sehat. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap rumah tangga memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak dan memadai, guna mengurangi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Adapun dasar hukum yang mendasari implementasi Program Jamban Sehat di Indonesia yaitu dengan adanya UU No 36 Tahun 2009 yang berisi kesehatan, UU tersebut bertujuan agar setiap orang mendapatkan kesehatan dan fasilitas sanitasi yang baik. Hal ini juga didukung dengan peraturan pada menteri kesehatan No 3 Tahun 2014 terkait sanitasi total berbasis masyarakat atau disingkat (STBM) dengan cakupan yaitu melarang untuk melakukan buang air besar sembarangan, dan salah satu strategi untuk mengatasi masyarakat yang suka buang air sembarangan. Selain itu pada peraturan menteri kesehatan No 70 tahun 2016 berisi terkait pentingnya standar dan persyaratan kesehatan lingkungan untuk menyediakan air minum yang bersih dan sanitasi yang baik. Tidak hanya itu saja, pada PP No 66 tahun 2014 yang berisikan kesehatan lingkungan, dan juga mengatur standar kesehatan lingkungan yang baik. Pelaksanaan program jamban sehat yang ada di daerah setempat, seperti halnya yang ada di kabupaten Sidoarjo juga di dukung adanya Peraturan baik dari daerah maupun bupati dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup yang sehat dengan penyediaan fasilitas sanitasi yang baik serta air yang bersih. Hal tersebut juga di dukung adanya peraturan dari menteri kesehatan No 3 tahun 2014 terkait fasilitas sanitasi seperti septic tank yang harus ada di setiap toilet guna menampung pembuangan akhir yang dihasilkan oleh rumah tangga dan tetap menjaga kebersihan lingkungan (Muaja et al., 2020). Dengan adanya hal ini maka program jambanisasi yang ada di kabupaten Sidoarjo selaras dengan peraturan presiden Nomor 72 tahun 2021 terkait percepatan penurunan angka stunting di tiap daerah. Maka dari itu program ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat seperti mengurangi angka stunting serta dapat mendorong masyarakat untuk gaya hidup sehat.

Salah satu program sanitasi jamban sehat yang berhasil dijalankan di Jawa Timur adalah program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Trenggalek yang dituliskan oleh Taufik Hidayat dalam jurnal "Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Trenggalek" yang diterbitkan pada tahun 2021. Program STBM di Kabupaten Trenggalek adalah inisiatif yang bertujuan untuk mengubah perilaku Masyarakat dalam hal sanitasi dan kebersihan. Program ini melibatkan Masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan fasilitas sanitasi. Program ini berhasil mencapai beberapa desa yang bebas dari buang air besar sembarangan (*Open Defecation Free/ ODF*). Kesuksesan ini dicapai melalui edukasi intensif, partisipasi aktif Masyarakat, dan dukungan dari pemerintah daerah. Program ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, partisipasi aktif Masyarakat, dan dukungan penuh dari pemerintah, Upaya meningkatkan sanitasi di daerah pedesaan dapat berhasil dengan baik.

Sanitasi di Indonesia menghadapi tantangan besar, tetapi juga terdapat upaya dan program signifikan yang berfokus pada peningkatan akses dan kualitas sanitasi. Melalui pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, serta kerja sama antara pemerintah, Masyarakat, dan mitra Internasional, Indonesia terus berupaya untuk mencapai target sanitasi yang lebih baik demi Kesehatan dan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Sanitasi yang memadai dinilai apabila terdapat fasilitas sanitasi untuk buang air besar perorangan atau masyarakat dan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir air limbah (Purwoko, 2018). Adapun mengembangkan sanitasi di Indonesia membawa berbagai keuntungan yang signifikan. Berikut adalah beberapa keuntungan dalam mengembangkam sanitasi jamban sehat diantaranya yaitu Sanitasi yang baik mengurangi penyebaran penyakit menular dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan berkurangnya penyakit, produktivitas kerja dan belajar meningkat. Pengeluaran untuk biaya pengobatan menurun, memungkinkan alokasi dana untuk kebutuhan lain yang lebih produktif. Adapun juga Sanitasi yang baik membantu melestarikan lingkungan dengan mencegah pencemaran air tanah dan permukaan. Dan membuat Kehidupan sosial masyarakat meningkat dengan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dan Desa yang memiliki sanitasi yang baik lebih mungkin mendapatkan bantuan dan dukungan dari pemerintah dan LSM. Sanitasi yang baik berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas hidup jangka panjang.

Sebagai salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Sidoarjo Pemerintah Desa Sumorame mengembangkan program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame dalam langkah penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan melindungi lingkungan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Melalui partisipasi dari masyarakat serta support dari pemerintah setempat dan dasar hukum yang mendasari, diharapkan program ini dapat berdampak positif dan signifikan kepada masyarakat nantinya terutama pada

warga desa Sumorame, yang mana desa tersebut juga bersampingan dengan aliran sungai sehingga pastinya menemui warga yang BAB sembarangan dan juga rendahnya fasilitas sanitasi maupun akses jamban. Selain itu, kesulitan dalam memperoleh dana untuk membangun fasilitas sanitasi yang layak bagi warga kurang mampu menambah tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup di desa Sumorame.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi terkait sanitasi untuk memastikan peningkatan kualitas kesehatan dan lingkungan hidup masyarakat. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Tujuan peraturan tersebut adalah mengatur segala upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat termasuk sanitasi. Ruang lingkupnya meliputi pengelolaan air limbah, penyediaan fasilitas sanitasi, dan pengelolaan sampah. Selain itu terdapat peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan melalui pendekatan berbasis masyarakat. Implementasi program jamban sehat di desa merupakan bagian dari upaya peningkatan sanitasi dan kesehatan masyarakat pedesaan. Langkah-langkah dalam proses implementasi program tersebut diawali dengan identifikasi dan perencanaan, Pemerintah Desa Sumorame melakukan survei awal untuk mengidentifikasi jumlah rumah tangga yang belum memiliki jamban sehat dan memahami kondisi sanitasi di desa. Proses ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam pemetaan sosial untuk mengetahui area yang paling membutuhkan. Selanjutnya Menyusun rencana program yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, anggaran, dan jadwal pelaksanaan. Sebelum program dilaksanakan pemerintah desa mengadakan sosialisasi tentang pentingnya sanitasi yang baik dan dampak jamban sehat terhadap kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang cara membuat dan merawat jamban sehat. Selanjutnya Membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan masyarakat, pemerintah desa, dan tenaga kesehatan untuk mengkoordinasikan program.

Tahap selanjutnya adalah Menentukan lokasi pembangunan jamban berdasarkan hasil survei dan kebutuhan masyarakat setelah itu dilanjutkan dengan melaksanakan pembangunan jamban sehat sesuai standar teknis yang ditentukan, dengan sistem swakelola dan melibatkan tenaga kerja lokal untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap pembangunan tersebut. Selain itu melakukan pengawasan dan evaluasi selama proses konstruksi untuk memastikan kualitas konstruksi jamban. Melakukan monitoring berkala untuk mengevaluasi keberhasilan program dan melakukan perbaikan jika diperlukan, Mendokumentasikan seluruh proses dan hasil dari program untuk pembelajaran dan referensi di masa depan. Implementasi program jamban sehat di desa membutuhkan kerja sama berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan keberhasilannya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Adapun kriteria untuk penerima bantuan jamban di Desa Sumorame antara yaitu pertama, Keluarga Kurang Mampu, "Kepada keluarga yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kami dengan bangga memberikan bantuan jamban sehat. Kami berharap fasilitas ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan Anda sekeluarga.". Kedua, Keluarga yang Tidak Memiliki Fasilitas Sanitasi Layak, "Bagi keluarga yang belum memiliki jamban di rumah dan masih melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS), kami dengan senang hati memberikan bantuan jamban sehat. Semoga fasilitas ini dapat membantu Anda menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.". Dan yang ketiga Kelompok Rentan "Kepada keluarga yang memiliki anggota lanjut usia atau penyandang disabilitas, kami dengan tulus memberikan bantuan jamban sehat yang dirancang khusus untuk kebutuhan Anda. Kami berharap fasilitas ini dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.". Dalam menjalankan Program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan anggaran dan jumlah penerima bantuan jamban setiap tahunnya.

Tabel 1. Rekapitulasi Anggaran Program Sanitasi di Pemerintahan Desa Sumorame

No	Tahun	Anggaran	Jumlah bantuan jamban
1	2019	Rp. 164.400.000,00,-	24 Unit
2	2022	Rp. 30.000.000,00,-	3 Unit
3	2023	Rp. 20.000.000,00,-	2 Unit

Sumber: Diolah dari pemerintah Desa Sumorame(2024)

Berdasarkan dari tabel diatas, laporan rekapitulasi anggaran dan jumlah penerima jamban dalam program sanitasi jamban sehat yang telah dijalankan di Desa Sumorame dari tahun 2019 hingga perencanaan tahun 2024. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebersihan lingkungan di desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo melalui pembangunan fasilitas jamban yang layak dan sehat. Pada tahun 2019, program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 164.000.000,00,-, yang digunakan untuk pembangunan 24 unit jamban sehat. Pelaksanaan program di tahun tersebut berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat desa. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, program ini mengalami penghentian sementara

dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda. Meskipun demikian, Desa Sumorame tetap berkomitmen untuk melanjutkan program ini demi kesejahteraan masyarakat. Program kembali dijalankan pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00-, yang digunakan untuk pembangunan 3 unit jamban sehat. Pada tahun 2023, program berhasil membangun 2 unit jamban sehat dengan anggaran Rp. 20.000.000,00-, dan untuk tahun 2024, Desa Sumorame merencanakan pembangunan 3 unit jamban sehat lagi untuk melanjutkan upaya dalam menyediakan fasilitas sanitasi yang layak bagi seluruh warga Desa Sumorame.

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain penelitian dari Rina Dewi dengan judul "Peran Komunitas dalam Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini mengeksplorasi peran komunitas dalam implementasi program sanitasi di Sleman dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Wawancara, FGD, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Temuan utamanya adalah dukungan dan partisipasi aktif komunitas lokal sangat penting untuk keberhasilan program. Keterlibatan pemimpin komunitas dan tokoh Masyarakat membantu mempercepat proses implementasi dan mengatasi tantangan yang muncul. Penelitian terdahulu lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat dengan judul "Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini mengeksplorasi pelaksanaan program STBM di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dinamika implementasi, dengan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini adalah partisipasi Masyarakat dan dukungan pemerintah daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program ini. Edukasi dan kampanye sanitasi yang dilakukan secara berkelanjutan membantu meningkatkan keadaan dan perubahan perilaku sanitasi masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Supracayaningsih juga membahas hal yang sama dengan judul "Implementasi Program Sanitasi total Berbasis dan Pemasaran (StoPS) dalam pembuatan jamban sehat di desa Sambung kecamatan Perak kabupaten Jombang" penelitian tersebut menjelaskan terkait kesuksesannya dalam melaksanakan program StoPS dengan melakukan pendekatan *Community Lead Total Sanitation* atau (CLTS) pada desa Sambung kecamatan Perak kabupaten Jombang, penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya pengaruh komunikasi, struktur birokrasi, disposisi, sumber daya dan juga dukungan setiap kelompok sasaran sehingga dengan pendekatan tersebut dapat mempengaruhi peningkatan akses jamban yang sehat di masyarakat. Dilain sisi pada penelitian ini juga membahas terkait keterlibatan pemerintah dan masyarakat setempat yang mendukung program StoPS guna mewujudkan kebijakan STBM dan pengaruh pelaksanaan program ini di desa tersebut guna mengurangi angka BABS. Selaras dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan oleh peneliti maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait faktor dialog dan kerjasama yang mempengaruhi pelaksanaan program. Selain itu penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa implementasi program sanitasi jamban sehat di berbagai daerah termasuk Jawa menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran, variasi kebutuhan desain jamban, dan dampak sosial. Namun partisipasi Masyarakat, edukasi, dan dukungan pemerintah daerah berperan penting dalam keberhasilan program-program tersebut.

Berdasarkan observasi di lapangan mengenai pengembangan program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pertama, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pembangunan jamban sehat di desa ini harus dilakukan secara bertahap. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah desa dihadapkan pada keharusan untuk menetapkan skala prioritas dan membagi alokasi dana secara bertahap. Konsekuensinya, tidak semua rumah di desa tersebut dapat segera memperoleh fasilitas jamban sehat secara serentak. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang agar alokasi dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin, sambil memastikan bahwa pembangunan berjalan secara adil serta dapat dirasakan oleh setiap warga. Dilain sisi yang menjadi tantangan yaitu perbedaan kebutuhan dan kebutuhan setiap rumah tangga, sebab setiap rumah tangga yang belum memiliki jamban memiliki kondisi yang berbeda seperti segi ruangan yang berbeda bentuk, akses saluran terbatas, akses tanah yang berbeda dan juga budaya keseharian yang berbeda. Sehingga diperlukan adanya pendekatan yang fleksibel dan responsif dengan disesuaikan kebutuhan yang ada di lapangan. Selain itu pelaksanaan program ini juga mendapatkan tantangan tersendiri yang dapat berpotensi menimbulkan dampak sosial maupun psikologis di kalangan masyarakat, seperti sebagian masyarakat yang merasa tidak terima karena proses program jamban ini tidak sesuai prioritas yang mereka anggap penting. Hal tersebut menimbulkan sedikit ketidakpuasan yang dirasakan oleh setiap masyarakat atau warga karena merasa sepenuhnya kurang merata. Dampak sosial ini sangat penting segera diatasi karena sangat berpengaruh terhadap kelancaran program nantinya.

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan teori dan Van Meter dan Van Horn (1974) guna menganalisis dan mendapatkan hasil yang valid terkait pelaksanaan sanitasi jamban di desa Sumorame Sidoarjo. Melalui teori tersebut peneliti menemukan bahwa suatu kebijakan merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ditaati dan dilakukan. Pernyataan tersebut selaras dengan kebijakan publik, implementator, dan performa kebijakan. Melalui pendekatan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu top-down yang diartikan sebagai A model of the policy implementation. Melalui teori ini mempermudah dalam menganalisis terkait program sanitasi yang dijalankan di desa Sumorame untuk meningkatkan keefektifan program tersebut. Adapun

variabel yang mempengaruhi program atau kebijakan yang tertuang pada teori ini yaitu: 1) Ukuran dan tujuan kebijakan. 2) Sumber Daya. 3) Karakteristik agen pelaksana. 4) Komunitas antar organisasi. 5) Lingkungan Ekonomi. 6) Disposisi atau sikap pelaksana. Melalui teori dan variabel yang termuat ini, dapat mengimplementasikan program yang ada di desa Sumorame dapat berjalan secara efektif dan keberlanjutan guna memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

II. METODE

Dalam penelitian terkait “Implementasi Program Sanitasi Jamban Sehat di Desa Sumorame” peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Dengan penelitian kualitatif, penulis bermaksud untuk memperoleh gambaran secara rinci dan komprehensif mengenai apa yang terjadi di lapangan serta mendeskripsikan pelaksanaan Program Jamban Sehat Desa Sumorame untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses implementasi program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame. Lokasi yang diteliti adalah Desa Sumorame dan waktu penelitian dilakukan selama periode empat bulan, dari maret hingga Juli akhir 2024. Informan utama yaitu keluarga yang telah mendapatkan jamban sehat yaitu Sumaiyah RT 01/ RW 08, Kepala desa Sumorame yaitu bapak Rocmanu dan sekretaris desa Sumorame bapak Muhammad Zainul Arifin serta perangkat desa terkait pelaksana program jamban sehat yang terlibat yaitu Mujib Riduwan S.Pd Jabatan sebagai kasi Kesra(Kepala Seksi Kesejahteraan) di Desa Sumorame. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Wawancara Mendalam Dilakukan dengan warga, lurah dan Sekretaris desa Sumorame, perangkat desa, dan pelaksana kegiatan program tersebut untuk memahami proses implementasi dan tantangan yang dihadapi. Selain itu penulis menggunakan data sekunder dari Sumber data dalam penelitian ini mencakup literatur yang diperoleh dari media, jurnal atau buku yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti dari rentang tahun 2016-2021. Penentuan informan dilakukan berdasarkan penilaian berdasarkan penilaian terhadap karakteristik sampel yang dibutuhkan dan sesuai dengan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk teknis analisis data hasil berpedoman pada model analisis data mempergunakan model interaktif yang dijabarkan Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Merujuk pada kajian Miles, Huberman, dan Saldana (2014) analisisnya dengan empat alur yang menjadi contoh dalam penyajiannya ataupun penarikan garis besarnya. Setelah data dikumpulkan, Langkah selanjutnya menganalisisnya melalui Langkah-langkah berikut: 1) Pengumpulan Data, Mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumen, dan metode lain yang relevan. Tujuannya ialah Mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 2) Reduksi Data, Memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data yang terkumpul. Yang tujuannya Merangkum dan mengorganisir data agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Contohnya termasuk pengkodean data, membuat catatan lapangan, dan merangkum hasil wawancara. 3) Penyajian Data, Menyajikan data dalam bentuk yang dapat diinterpretasikan, seperti matriks, grafik, tabel, dan diagram. Tujuannya Menyediakan cara visual untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan yang mungkin tidak terlihat dalam bentuk data mentah. 4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, Aktivitas Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan memverifikasi validitas kesimpulan tersebut (Sugiyono, 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sumorame, yang terletak di Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan salah satu desa yang telah mengimplementasikan program sanitasi jamban sehat sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan sanitasi yang telah lama menjadi perhatian di daerah tersebut, seperti praktik buang air besar sembarangan dan kurangnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai untuk warga kurang mampu. Program sanitasi jamban sehat ini diluncurkan sebagai respons terhadap hasil survei kesehatan lingkungan yang menunjukkan tingginya angka penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk, seperti diare dan infeksi saluran pencernaan. Pemerintah desa, bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat dan organisasi non-pemerintah, merancang program ini untuk memberikan solusi jangka panjang terhadap masalah tersebut. Pelaksanaan program sanitasi jamban di desa Sumorame Sidoarjo merupakan hal yang sangat krusial, sebab penerapan ini dilakukan untuk meninjau beberapa faktor yang ada khususnya pada masyarakat. Program ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada dan sesuai dengan harapan masyarakat yaitu bisa berdampak positif. Melalui hasil penelitian terdahulu serta penjelasan yang telah peneliti paparkan dan akan dilakukan analisis dari sanitasi jamban sehat. Model pelaksanaan menggunakan teori dari Donald Van Meter dan Van horn (Agustino, 2020). Dengan 6 indikator yang dapat mempengaruhi kinerja Implementasi Kebijakan pada Program Sanitasi Jamban Sehat di Desa Sumorame. Keenam indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:

A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa tujuan dan standar kebijakan adalah komponen utama yang menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Standar kebijakan adalah

garis besar, aturan, atau standar yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Standar ini digunakan untuk menentukan seberapa efektif pelaksanaan kebijakan. Tujuan kebijakan, di sisi lain, adalah hasil akhir atau kondisi yang diinginkan dari pelaksanaan kebijakan. Agar evaluasi dapat dilakukan dengan efektif dan proses implementasi dapat dilacak, tujuan ini harus jelas dan spesifik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Desa Sumorame dianggap berhasil dalam menerapkan program sanitasi jamban sehat sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Sumorame, Bapak Rochmanu, membuktikan hal ini dengan mengatakan: *“Tujuan dari program ini yaitu untuk mewujudkan SDGs sustainability yang termuat pada nomor 6 yaitu memastikan ketersediaan air bersih untuk masyarakat dan juga sanitasi yang baik guna menciptakan gaya hidup yang sehat. Pada waktu itu pencapaian desa Sumorame terkait program sanitasi jamban sehat masi belum maksimal sehingga harus dimasukkan dalam RKPDes tahun 2019 sampai sekarang. Untuk memaksimalkan tujuan pencapaian tersebut maka desa Sumorame berkomitmen akan meningkatkan fasilitas sanitasi masyarakat dengan program sanitasi jamban sehat. Untuk mendukung jalannya rogram ini juga tidak luput dari peraturan dan kebijakan program dengan melibatkan berbagai pihak agar proses yang dilakukan nantinya dapat berjalan dengan lancar. Hasil proses ini nantinya akan dilakukan musyawarah secara mufakat serta dituangkan dalam peraturan desa guna menjadi pedoman dalam pelaksanaan program tersebut.”* (Wawancara 18 juli 2024). Dalam wawancara diatas dapat dijelaskan bahwaSalah satu tujuan utama dari implementasi program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame adalah untuk meningkatkan capaian SDGs Desa nomor 6, yaitu memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak bagi semua penduduk desa. Pada saat itu, capaian Desa Sumorame dalam aspek ini kurang maksimal, sehingga harus dimasukkan dalam RKPDes tahun 2019 hingga saat ini. Dalam upayanya untuk mencapai tujuan tersebut, Desa Sumorame berkomitmen meningkatkan fasilitas sanitasi masyarakat melalui program sanitasi jamban sehat. Peraturan dan kebijakan terkait program ini disusun dan diterapkan dengan baik melalui beberapa proses dan tahapan dengan berkolaborasi bersama masyarakat maupun kelompok lainnya. Hasil proses ini nantinya akan dilakukan oleh semua masyarakat atau beberapa pihak guna menyetujui program ini kemudian akan hasil tersebut akan dituangkan dalam kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan dan kelancaran program sanitasi jamban sehat nantinya. Dengan pelaksanaan program ini maka selaras dalam memenuhi komitmen SDGs nomor 6 yang menjagi agenda dalam melaksanakan pembangunan desa. Diharapkan dengan adanya program ini maka desa Sumorame dapat mensejahterakan penduduknya dengan menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai. Oleh karena itu, dengan memasukkan program sanitasi jamban sehat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sejak tahun 2019, pemerintah desa menunjukkan dedikasinya dalam menangani isu sanitasi sebagai prioritas utama.

Proses penyusunan peraturan dan kebijakan program ini melibatkan berbagai tahapan dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bekerja sama untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap tahapan, mulai dari identifikasi masalah sanitasi, perencanaan anggaran, hingga pelaksanaan di lapangan, dilakukan dengan transparan dan melibatkan masukan dari masyarakat. Musyawarah desa menjadi forum utama di mana semua hasil proses ini dibahas dan disepakati. Dalam musyawarah desa, warga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Peraturan desa yang dihasilkan dari musyawarah ini kemudian menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan program. Kebijakan yang telah disusun tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga bottom-up, yang berarti setiap kebijakan didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Sebelum program dilaksanakan, kebijakan ini disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat melalui musyawarah desa. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga memahami tujuan, manfaat, dan cara berpartisipasi dalam program sanitasi jamban sehat. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan partisipasi aktif dari masyarakat, program ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Komitmen Desa Sumorame dalam meningkatkan fasilitas sanitasi menunjukkan tekad yang kuat untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warganya. Dengan mengutamakan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak, desa ini tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan dasar warganya tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan global. Implementasi program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame merupakan contoh bagaimana kebijakan yang disusun dengan baik, melibatkan partisipasi masyarakat, dan didukung oleh komitmen kuat dari pemimpin desa dapat membawa perubahan positif yang signifikan. Dukungan dan antusiasme dari semua pihak menunjukkan bahwa program ini tidak hanya diterima dengan baik tetapi juga dianggap sebagai langkah penting menuju kesejahteraan dan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh penduduk desa.

Fenomena Tersebut diatas Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1974), fenomena di Desa Sumorame mencerminkan beberapa komponen penting yang berperan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Teori ini mengidentifikasi enam variabel yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, yaitu Tujuan yang jelas dan spesifik seperti peningkatan capaian SDGs Desa nomor 6 memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan program sanitasi jamban sehat. Dalam konteks Desa Sumorame, kepala desa telah menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk meningkatkan fasilitas sanitasi sebagai bagian dari upaya mencapai SDGs. Proses penyusunan kebijakan dilakukan melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan berbagai pihak, sehingga menciptakan komitmen kolektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sosialisasi kebijakan melalui

musyawarah desa juga mencerminkan upaya untuk memastikan komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat, yang merupakan salah satu faktor kunci dalam teori Van Meter dan Van Horn. Komitmen Desa Sumorame untuk meningkatkan fasilitas sanitasi melalui program sanitasi jamban sehat menunjukkan bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik ketika ada tujuan yang jelas, sumber daya yang memadai, dan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Melalui pendekatan ini, diharapkan capaian SDGs Desa nomor 6 dapat meningkat, dan kualitas hidup masyarakat Desa Sumorame dapat lebih baik.

B. Sumber Daya

Menurut teori implementasi kebijakan dari Van Meter and Van Horn (1974), sumber daya merupakan sesuatu bentuk yang dapat mendukung tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Adapaun yang dimaksud dari sumber daya yaitu seperti financial, informasi, material, dan manusia guna mencapai tujuan atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan ketersediaan sumber daya yang memadai maka suatu tujuan atau program dapat tercapai dengan maksimal, namun sebaliknya jika keterbatasan sumber daya maka suatu pelaksanaan akan terasa kurang maksimal. Ibu Endang Noer Anisah Selaku Kaur Keuangan Desa Sumorame mengungkapkan bahwa *“Pelaksanaan untuk program sanitasi jamban sehat sedikit mengalami kendala financial, dimana dana desa yang bersumber dari APBN dan penggunaan dana tersebut diatur oleh regulasi yang ada. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan jamban sehat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Dalam pelaksanaan program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame, beberapa unsur berperan, termasuk pemerintah desa yang bertugas sebagai pelaksana anggaran, lembaga desa, dan masyarakat yang menjadi tim pelaksana kegiatan sekaligus pengawas. Menurut Bapak Kepala Desa, orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan program ini sangat kompeten sesuai dengan tugas masing-masing sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Sesuai dengan rencana anggaran belanja yang sudah ditentukan dalam APBDes, segala kebutuhan baik bahan maupun peralatan dalam program ini sudah terpenuhi dengan baik”*. (Wawancara 18 Juli 2024).

Tabel 2. Anggaran dana yang dikeluarkan perorang tahun 2022

No	Nama	Alamat	Anggaran
1	Siti Sumaiyah	RT 01/ RW 08	Rp. 10.000.000,-
2	Yanti	RT 02/ RW 05	Rp. 10.000.000,-
3	Sumarlik	RT 01/ RW 04	Rp. 10.000.000,-
Jumlah			Rp. 30.000.000,-

Sumber: Diolah dari pemerintah Desa Sumorame (2024)



Gambar 1. Pembangunan jamban pada rumah (Siti Sumaiyah)

Sumber: Diolah dari pemerintah Desa Sumorame (2024)



Gambar 2. Penerima jamban Siti Sumaiyah RT 08 RW 01

Sumber: Diolah dari pemerintah Desa Sumorame (2024)

Berdasarkan tabel 2 dari data diatas Program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame merupakan bagian dari upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas sanitasi yang layak. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program ini adalah pengelolaan anggaran yang tepat dan transparan. Berdasarkan Tabel 2, pada tahun 2022, Desa Sumorame telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 10.000.000,- per orang untuk tiga warga, yaitu Siti Sumaiyah dari RT 01/RW 08, Yanti dari RT 02/RW 05, dan Sumarlik dari RT 01/RW 04. Total anggaran yang dikeluarkan untuk ketiga penerima manfaat ini mencapai Rp. 30.000.000,-. Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- per orang mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam memastikan setiap rumah tangga mendapatkan fasilitas jamban yang memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Dana ini mencakup biaya bahan bangunan, tenaga kerja, serta peralatan yang diperlukan untuk membangun jamban sehat. Dengan alokasi anggaran yang cukup, diharapkan setiap penerima manfaat dapat memiliki jamban yang layak, yang tidak hanya meningkatkan kebersihan lingkungan tetapi juga kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan jamban sehat di Desa Sumorame merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat. Salah satu rumah yang mendapatkan bantuan tersebut adalah rumah milik Siti Sumaiyah seperti pada gambar 1 dan gambar 2 diatas, yang berlokasi di RT 01/RW 08. Dengan total anggaran sebesar Rp. 10.000.000, pembangunan jamban ini telah dilaksanakan dengan baik, memastikan bahwa kebutuhan dasar akan sanitasi yang layak dapat terpenuhi. Siti Sumaiyah, selaku penerima manfaat, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas bantuan yang diberikan. *“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan ini. Dengan adanya jamban yang sehat di rumah, saya merasa lebih nyaman dan yakin kesehatan keluarga saya akan lebih terjaga,”* ujar Siti Sumaiyah. Bantuan ini tidak hanya memberikan fasilitas fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas hidup di Desa Sumorame secara keseluruhan.

Pengelolaan anggaran ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat. Pemerintah desa bertanggung jawab sebagai pelaksana anggaran, memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Lembaga desa dan masyarakat juga berperan aktif sebagai tim pelaksana kegiatan sekaligus pengawas, memastikan bahwa pembangunan jamban sehat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan anggaran digunakan secara efisien. Ransparansi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi prioritas utama. Setiap tahapan pelaksanaan program dan penggunaan dana disosialisasikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa program sanitasi jamban sehat mendapatkan dukungan penuh dari seluruh warga desa. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengawasi langsung pelaksanaan program dan melaporkan jika terdapat penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Meskipun anggaran yang tersedia terbatas dan bersumber dari Dana Desa yang penggunaannya diatur oleh regulasi yang ketat, pemerintah desa tetap berusaha untuk memaksimalkan penggunaan dana tersebut. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Strategi ini memastikan bahwa meskipun anggaran terbatas, program sanitasi jamban sehat tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Secara keseluruhan, alokasi anggaran untuk program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas hidup warganya. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, program ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menyediakan fasilitas sanitasi yang layak dan meningkatkan kesehatan serta kebersihan lingkungan di Desa Sumorame.

Dari fenomena diatas jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, sumber daya yang mencukupi meliputi finansial, manusia, material, dan informasi. Dalam kasus Desa Sumorame, meskipun ada keterbatasan finansial, perencanaan yang matang dan alokasi anggaran yang tepat memungkinkan program untuk tetap berjalan. Dukungan material dan peralatan yang diperlukan telah terpenuhi sesuai dengan rencana anggaran belanja yang telah ditentukan dalam APBDes. Selain itu, kompetensi dari para pelaksana program juga merupakan sumber daya manusia yang berharga dalam implementasi kebijakan ini. Secara keseluruhan, fenomena di Desa Sumorame menunjukkan bahwa dengan manajemen sumber daya yang baik, meskipun ada keterbatasan anggaran, program sanitasi jamban sehat dapat diimplementasikan secara efektif. Pendekatan bertahap dan berkelanjutan, serta kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, kendala sumber daya dapat diatasi untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

C. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Menurut Van Meter and Van Horn (1974) yang merujuk pada teori nya yaitu implementasi kebijakan menjelaskan bahwa karakteristik lembaga pelaksana yaitu seperti tanggung jawab, peran anggota, dan melaksanakan kebijakan yang sudah tertulis. Ciri-ciri karakteristik lembaga pelaksana yang baik yaitu dengan adanya koordinasi atau komunikasi yang efektif, ketegasan dari seorang pimpinan dalam mengambil keputusan, memiliki kompetensi yang tinggi di bidangnya, serta pelaksanaan dan sistem yang transparan. Bapak Muhammad Zainul Arifin Selaku Sekertaris Desa Sumorame juga berpendapat bahwa " *sistem organisasi di desa Sumorame terkait program sanitasi jamban sehat terdapat beberapa komponen dalam pelaksanaannya yaitu ada tim yang bertugas dalam melaksanakan program ini dari awal sampai selesai dan dipertanggungjawabkan baik secara tertulis kepada semua elemen seperti kepala desa, badan permusyawaratan desa (BPD), dan perwakilan masyarakat dengan melaporkan setiap temuan hasil pemantauan di lapangan. Meskipun tidak ada pelatihan khusus karena pelaksana program merupakan orang-orang yang sudah kompeten dalam tugasnya masing-masing baik dan sesuai target pembangunan. Meskipun di awal program ada beberapa kendala, namun bisa diselesaikan dengan baik dan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pada program selanjutnya.*" (Wawancara 18 Juli 2024).

Tabel 3. Struktur Organisasi Pelaksanaan Program Jamban Sehat

No	Unsur	Tugas/ Kewenangan
1	Kepala desa	Menetapkan Program Jamban Sehat dalam rencana APBDes.
2	Tim pelaksana kegiatan	Melaksanakan program Jamban Sehat yang sudah ditetapkan di APBDes dan melaporkan Hasil Kegiatan kepada Kepala Desa Sumorame.
3	Perwakilan masyarakat (BPD)	Melakukan pengawasan dan evaluasi program Jamban Sehat di Desa Sumorame.

Sumber: Diolah dari Pemerintahan Desa Sumorame 2024

Berdasarkan tabel 3. Terlihat dari data diatas bahwa Struktur organisasi pelaksanaan program Jamban Sehat di Desa Sumorame melibatkan beberapa unsur kunci dengan tugas dan kewenangan yang spesifik. Pertama, Kepala Desa memiliki peran sentral dalam menetapkan Program Jamban Sehat sebagai bagian dari rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tanggung jawab Kepala Desa meliputi pengambilan keputusan strategis dan perencanaan keuangan untuk memastikan bahwa program ini dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang memadai dan sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Kedua, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bertugas melaksanakan program Jamban Sehat yang telah ditetapkan dalam APBDes. TPK ini terdiri dari individu-individu yang memiliki keterampilan teknis dan operasional yang diperlukan untuk mewujudkan program ini di lapangan. Mereka bertanggung jawab mulai dari tahap perencanaan detail, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa Sumorame. Pelaksanaan program oleh TPK mencakup berbagai aktivitas seperti penyuluhan kepada masyarakat, pembangunan fasilitas sanitasi yang memadai, dan pemantauan kualitas serta keberlanjutan penggunaan jamban oleh warga desa. Ketiga, Perwakilan Masyarakat atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Jamban Sehat. BPD berfungsi sebagai badan yang mengawasi agar

program berjalan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah disetujui. Mereka juga berperan dalam mengevaluasi keberhasilan program serta memberikan masukan atau rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Pengawasan oleh BPD memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Desa Sumorame. Secara keseluruhan, kolaborasi antara Kepala Desa, Tim Pelaksana Kegiatan, dan Perwakilan Masyarakat (BPD) merupakan kunci suksesnya implementasi Program Jamban Sehat di Desa Sumorame. Dengan tugas dan kewenangan yang jelas, masing-masing unsur dapat berkontribusi secara optimal sesuai dengan peran mereka, sehingga tujuan program untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas sanitasi yang layak dapat tercapai.

Dalam konteks program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame, para petugas yang melaksanakan program ini dinilai sangat baik oleh masyarakat. Salah satu penerima manfaat, Siti Sumaiyah, memberikan penilaiannya terhadap kinerja para petugas dengan mengatakan, “*Para petugas yang datang ke rumah sangat baik dan ramah, selain itu para petugas juga pada membantu pemasangan serta menjelaskan terkait perawatan dan penggunaan jamban.*” (Wawancara 18 Juli 2024). Dari ungkapan salah satu warga penerima jamban menunjukkan bahwa petugas tidak hanya kompeten di bidang teknis tetapi mereka juga bisa melayani dengan ramah dan komunikasi yang baik kepada warga setempat. Hal tersebut juga merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa penerima manfaat memahami cara merawat fasilitas yang diberikan. Kualitas interaksi ini sejalan dengan prinsip-prinsip Van Meter dan Van Horn, yang menekankan pentingnya kapasitas dan perilaku agen pelaksana dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan program ini di Desa Sumorame dapat dikaitkan dengan kinerja petugas yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sikap ramah dan penjelasan yang sabar dari petugas menunjukkan bahwa mereka tidak hanya melaksanakan tugas mereka secara teknis, tetapi juga berusaha untuk memastikan bahwa penerima manfaat dapat memanfaatkan fasilitas dengan optimal. Hal ini merupakan indikasi bahwa agen pelaksana memiliki kompetensi yang memadai, baik dalam aspek teknis maupun dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.

Fenomena di atas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, terutama dalam hal karakteristik lembaga pelaksana. Struktur organisasi yang jelas dan peran yang terdefinisi dengan baik adalah komponen penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks Desa Sumorame, kepala desa berperan sebagai pemimpin yang memberikan arahan dan memastikan program berjalan sesuai dengan rencana. Tim pelaksana kegiatan memiliki tanggung jawab yang jelas dalam melaksanakan program dari awal hingga selesai, serta mempertanggungjawabkan hasilnya secara tertulis kepada kepala desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi juga sangat penting. Ini mencerminkan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Meskipun tidak ada pelatihan khusus, kompetensi para pelaksana program yang sudah mumpuni menjadi modal penting dalam pelaksanaan program ini. Menurut teori Van Meter dan Van Horn, karakteristik lembaga pelaksana yang baik mencakup beberapa aspek, seperti kepemimpinan yang efektif, koordinasi yang baik antara anggota, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang muncul selama pelaksanaan kebijakan. Dalam kasus Desa Sumorame, meskipun terdapat beberapa kendala di awal program, kemampuan lembaga pelaksana untuk menyelesaikan masalah dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas yang baik. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam teori Van Meter dan Van Horn, di mana kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan melakukan perbaikan terus-menerus adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Fenomena di Desa Sumorame menunjukkan bagaimana karakteristik lembaga pelaksana yang baik dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang jelas, peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, kompetensi yang memadai dari para pelaksana, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif semuanya berkontribusi pada keberhasilan program sanitasi jamban sehat. Melalui pendekatan ini, Desa Sumorame dapat memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan sesuai rencana tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

D. Komunikasi Antar Organisasi

Menurut Van Meter and Van Horn (1974) yang merujuk pada teorinya yaitu implementasi kebijakan, menjelaskan bahwa komunikasi antar organisasi adalah suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program dan juga menjaga kelancaran di setiap proses pelaksanaannya. Variabel ini sangat penting karena komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk memastikan koordinasi yang baik, berbagi informasi, dan pemecahan masalah secara kolektif. Komunikasi yang baik memungkinkan setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya, mengetahui perkembangan program, serta memberikan masukan dan feedback untuk perbaikan berkelanjutan. Salah satu sekretaris desa yaitu bapak Muhammad Zainul mengungkapkan bahwasannya “pelaksanaan program sanitasi jamban sehat tidak luput dengan komunikasi antar seluruh anggota program yang terlibat untuk memastikan program tersebut terkoordinasi secara efektif. Salah satunya yaitu dengan melakukan pertemuan untuk memastikan hasil dan temuan dilapangan, tidak hanya itu saja mereka juga melakukan komunikasi melalui media sosial seperti grup whatsapp guna tetap menjaga komunikasi dan tetap terkoordinasi satu sama lain. Mereka juga melakukan pertemuan rutin kepada warga terkait sanitasi jamban sehat serta mengedukasi

warga untuk mengetahui kendala maupun manfaat positif yang diterima oleh setiap warga. Semua laporan yang terjadi di lapangan serti melakukan edukasi dan pengeluaran biaya yang dilakukan oleh tim di lapangan, semuanya ditulis dan nantinya akan dilaporkan guna mendapatkan informasi dan evaluasi terhadap jalannya program tersebut maupun program kedepannya.” (Wawancara 18 Juli 2024).

Tabel 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Jamban Sehat

No.	Langkah/Tindakan	Deskripsi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi Program	Mengadakan pertemuan dengan warga untuk menjelaskan pentingnya sanitasi	Pemerintah Desa	Minggu ke-1
2	Identifikasi Lokasi	Survey lokasi untuk menentukan rumah yang memerlukan jamban sehat	Tim Pelaksana Kegiatan	Minggu ke-2
3	Penyusunan Rencana	Membuat rencana kerja dan anggaran untuk pembangunan jamban	Kaur Perencanaan	Minggu ke-3
4	Pengadaan Material	Pembelian dan pengadaan material yang dibutuhkan	Tim Pelakasa Kegiatan	Minggu ke-4
5	Pembangunan Jamban	Konstruksi jamban sehat di lokasi yang telah ditentukan	Tim Pelakasa Kegiatan	Minggu ke 5 sampai 8
7	Pengawasan dan Monitoring	Pengawasan proses pembangunan dan memastikan kualitas sesuai standar	BPD/Wakil masyarakat	Selama Pembangunan
8	Evaluasi Awal	Evaluasi awal terhadap hasil pembangunan	BPD/Wakil masyarakat	Minggu ke-9
9	Penyuluhan Pemeliharaan	Memberikan penyuluhan tentang cara pemeliharaan dan penggunaan jamban	Pemerintah Desa	Minggu ke-10

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Sumorame 2024



Gambar 3. Musyawarah Desa Tentang Program Sanitasi Jamban Sehat Tahun 2023

Sumber: Diolah dari pemerintah Desa Sumorame (2024)

Berdasarkan tabel 4 dan gambar 3 terlihat dari data diatas bahwa Program Jamban Sehat di Desa Sumorame dirancang melalui serangkaian langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak dengan tugas dan kewenangan yang jelas. Gambar musyawarah rapat di balai desa memberikan ilustrasi pentingnya kolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini. Rapat tersebut menggambarkan para pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Desa, Tim Pelaksana Kegiatan, Kaur Perencanaan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), duduk bersama untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam program Jamban Sehat. Langkah pertama dalam program ini adalah sosialisasi program, di mana Pemerintah Desa mengadakan pertemuan dengan warga untuk menjelaskan pentingnya sanitasi dan bagaimana Program Jamban Sehat akan membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. Pertemuan ini diadakan pada minggu pertama, dan bertujuan untuk membangun kesadaran serta mendapatkan dukungan dari warga

desa. Sosialisasi yang efektif memastikan bahwa semua warga memahami manfaat program dan berkomitmen untuk berpartisipasi. Langkah kedua adalah identifikasi lokasi, yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan pada minggu kedua. Mereka melakukan survei untuk menentukan rumah-rumah yang memerlukan jamban sehat. Proses ini melibatkan penilaian kondisi sanitasi di setiap rumah dan memilih lokasi yang paling membutuhkan bantuan. Data yang dikumpulkan selama survei ini menjadi dasar untuk penyusunan rencana pembangunan.

Pada minggu ketiga, Kaur Perencanaan bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pembangunan jamban. Langkah ini sangat penting karena memastikan bahwa semua kebutuhan material dan biaya telah dipertimbangkan dengan baik. Rencana yang dibuat harus mencakup semua detail teknis dan logistik untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Langkah keempat adalah pengadaan material yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan pada minggu keempat. Mereka bertanggung jawab untuk membeli dan menyediakan semua bahan yang diperlukan untuk pembangunan jamban. Proses ini harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa semua material yang dibeli memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Pembangunan jamban sehat dimulai pada minggu kelima dan berlangsung hingga minggu kedelapan. Tim Pelaksana Kegiatan bekerja di lapangan untuk membangun jamban di lokasi yang telah ditentukan. Mereka mengikuti rencana kerja yang telah disusun dan memastikan bahwa setiap jamban dibangun sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Selama periode ini, BPD atau wakil masyarakat melakukan pengawasan dan monitoring untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan ini penting untuk menjaga kualitas konstruksi dan mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan. Setelah pembangunan selesai, langkah ketujuh adalah evaluasi awal yang dilakukan oleh BPD atau wakil masyarakat pada minggu kesembilan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai hasil pembangunan dan memastikan bahwa semua jamban berfungsi dengan baik. Setiap masalah yang ditemukan selama evaluasi ini akan segera ditangani untuk memastikan keberlanjutan program. Langkah terakhir dalam program ini adalah penyuluhan pemeliharaan, yang dilakukan oleh Pemerintah Desa pada minggu kesepuluh. Warga diberikan penyuluhan tentang cara pemeliharaan dan penggunaan jamban yang benar untuk memastikan bahwa fasilitas yang dibangun dapat digunakan dengan efektif dan berkelanjutan. Penyuluhan ini mencakup panduan praktis dan informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan jamban. Gambar musyawarah rapat di balai desa menggambarkan proses kolaboratif yang berlangsung selama perencanaan dan pelaksanaan program Jamban Sehat. Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama semua pihak untuk bekerja sama demi mencapai tujuan program. Dengan peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas, kolaborasi ini memastikan bahwa program dapat dilaksanakan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Desa Sumorame.

Dalam kasus program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame, komunikasi antara petugas program dan masyarakat terlihat berjalan dengan baik. Siti Sumaiyah, salah satu penerima manfaat program ini, memberikan penilaian positif terhadap cara komunikasi yang dilakukan oleh petugas. Ia menjelaskan, “betul, saya telah mendapatkan penjelasan dari petugas terkait fasilitas jamban ini dan petugas juga memberikan brosur terkait tata cara merawat maupun ketika mengalami masalah untuk menghubungi normor yang tertera di brosur atau datang ke balai desa” (*Wawancara 18 Juli 2024*). Berdasarkan dari ungkapan warga tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas tidak hanya memberikan informasi yang jelas maupun edukasi kepada warga namun juga memberikan brosur yang berisi materi sehingga dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang cara merawat fasilitas yang diterima. Lebih lanjut, adanya nomor kontak yang disediakan melalui WhatsApp menunjukkan adanya saluran komunikasi yang terbuka dan mudah diakses bagi warga jika mereka mengalami kendala atau memiliki pertanyaan lebih lanjut. Dalam konteks teori Van Meter dan Van Horn, ini merupakan contoh komunikasi yang baik antar organisasi dalam hal ini antara pemerintah desa, petugas lapangan, dan masyarakat. Informasi yang disampaikan secara jelas dan tersedianya jalur komunikasi yang terbuka memungkinkan adanya umpan balik yang cepat dan solusi atas masalah yang mungkin muncul, yang pada akhirnya meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan.

Fenomena di atas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, khususnya dalam hal komunikasi antar organisasi. Komunikasi yang efektif di antara berbagai pihak yang terlibat dalam program sanitasi jamban sehat adalah kunci untuk memastikan koordinasi yang baik dan penyelesaian masalah yang cepat. Pengalaman Siti Sumaiyah menunjukkan bagaimana komunikasi yang baik dan terbuka antara agen pelaksana dan masyarakat berperan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn. Pertemuan berkala yang dilakukan sesuai dengan progres program memungkinkan setiap pihak memahami perkembangan dan tantangan yang dihadapi, serta memberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan solusi. Penggunaan grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi intens juga mencerminkan adaptasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi komunikasi. Grup ini memungkinkan anggota tim untuk berbagi informasi secara real-time, mendiskusikan masalah yang muncul, dan mengambil keputusan dengan cepat. Ini sangat penting dalam konteks implementasi kebijakan di mana kecepatan dan responsivitas dapat mempengaruhi keberhasilan program. Pertemuan rutin dengan masyarakat untuk memberikan update tentang perkembangan program dan mendiskusikan masalah yang dihadapi menunjukkan keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi. Edukasi tentang sanitasi dan kesehatan yang dilakukan di balai desa atau melalui media sosial juga membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat,

yang merupakan elemen penting dalam keberhasilan program sanitasi. Tim pelaksana kegiatan yang membuat laporan secara tertulis kepada pelaksana anggaran terkait semua anggaran yang dikeluarkan dalam program ini menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana. BPD, yang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya program, berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan feedback yang memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

E. Sikap Pelaksana

Menurut Van Meter and Van Horn (1974) dalam teorinya yaitu teori implementasi kebijakan, mengungkapkan bahwa sikap pelaksana merupakan suatu tindakan terhadap kebijakan yang ada apakah mereka berkomitmen dengan kebijakn tersebut dan menjalankannya atau sebaliknya. Variabel sikap pelaksana ini sangat penting karena dapat melihat dari sudut pandang seseorang terhadap kebijakan yang berlaku. Setiap pelaksana diharapkan bisa memiliki sikap positif sebab dengan memiliki sikap positif maka seseorang dapat menyelesaikan suatu tujuannya dan termotivasi untuk bekerja lebih keras dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bapak Mujib Riduwan S. Pd Selaku Kasi Kesra dan Ketua Pelaksana Desa Sumorame mengungkapkan *"sudut pandang dari setiap pelaksana program sanitasi jamban sehat di desa Sumorame ini sangat positif, mereka sangat mendukung program ini dan mereka juga melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat. Hal tersebut dapat dilihat dari para pelaksana yang tidak hanya membantu memasang jambanan namun mereka juga mengedukasi dan berkomunikasi secara baik terhadap penerima jambanan. Hal seperti ini sangat penting sekali sebab dengan berkoordinasi kepada pelaksanaan dan juga memberikan motivasi dapat menciptakan sikap pelaksana yang positif, sehingga program sanitasi jamban sehat ini bisa berjalan dengan baik"*. (Wawancara 18 Juli 2024).

Berdasarkan ungkapan dari bapak Mujid Riduwan S. Pd selaku kasi kesra dan ketua pelaksana desa Sumorame dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan program yang dijalankannya sangat positif. Para pelaksana lainnya memiliki sudut pandang yang sama bahwasannya program sanitasi jamban sehat ini sangat baik dan positif baik untuk desa maupun lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat desa Sumorame Sidoarjo. Mereka semua melihat program ini tidak hanya sebagai tugas saja yang harus dilaksanakan namun juga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas warga desa serta mendukung SDGs nomor 6. Kesadaran ini mendorong mereka untuk berkomitmen penuh dalam setiap tahap pelaksanaan, mulai dari sosialisasi, identifikasi lokasi, penyusunan rencana, pengadaan material, hingga pembangunan dan evaluasi. Para pelaksana program merasa puas dan antusias dalam menjalankan program ini karena mereka dapat melihat dan merasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Setiap kali mereka melihat rumah-rumah yang kini memiliki fasilitas sanitasi yang layak, mereka merasa bahwa usaha dan kerja keras mereka terbayar dengan baik. Selain itu, dukungan yang kuat dan antusiasme dari para pelaksana menunjukkan sikap yang sangat positif terhadap program sanitasi jamban sehat. Mereka kerap kali mengadakan pertemuan dan diskusi untuk memastikan bahwa setiap langkah berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan. Dalam setiap rapat di balai desa, terlihat jelas semangat dan dedikasi mereka dalam mewujudkan program ini. Komitmen ini juga terlihat dalam cara mereka mengatasi tantangan dan masalah yang muncul selama pelaksanaan program. Dukungan dan antusiasme ini bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi tercermin dalam tindakan nyata. Misalnya, saat melakukan survei lapangan, Tim Pelaksana Kegiatan tidak ragu untuk terjun langsung dan berinteraksi dengan warga untuk memahami kebutuhan mereka. Pemerintah Desa juga memastikan bahwa anggaran dan sumber daya yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif untuk program ini. BPD, dengan peran pengawasannya, memastikan bahwa setiap langkah dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Kombinasi dari pandangan yang positif, komitmen yang kuat, dan antusiasme yang tinggi ini membuat program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Para pelaksana program berharap bahwa keberhasilan ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program serupa.

Program ini bisa dikatakan dapat berjalan dengan baik di desa Sumorame Sidoarjo, karena dapat dilihat dari respon warga penerima program sanitasi jamban sehat yang positif dan sangat puas. Salah satunya yaitu ibu Siti Sumaiyah yang mengungkapkan bahwa *"saya sangat bahagia dan puas menerima jamban ini, sebab sebelumnya kami kalo buang air di sungai. Namun kali ini kami memiliki jamban sendiri serta lebih bersih dan sehat sehingga tidak perlu repot-repot ke sungai."* Ungkapan tersebut dapat menggambarkan bahwa ibu Siti Sumaiyah dapat merasakan manfaat langsung dari program ini, baik dari segi kebersihan maupun kenyamanan. Kepuasan dan rasa syukur yang ia ungkapkan mencerminkan penerimaan yang tinggi terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan, yang sesuai dengan harapan dan tujuan program. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhasil memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, yang merupakan indikator keberhasilan dalam teori Van Meter dan Van Horn. Sikap positif seperti yang ditunjukkan oleh Siti Sumaiyah juga dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan dukungan masyarakat terhadap program tersebut di masa depan. Ketika masyarakat merasakan manfaat yang nyata, mereka cenderung lebih

mendukung dan memelihara fasilitas yang diberikan, yang pada gilirannya akan memastikan keberhasilan jangka panjang dari kebijakan yang diimplementasikan.

Fenomena di atas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Sikap pelaksana yang positif dan komitmen yang kuat terhadap program merupakan faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap pelaksana yang mendukung program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya program ini bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka menyadari bahwa sanitasi yang baik adalah dasar bagi peningkatan kualitas hidup dan pencegahan penyakit. Sikap pelaksana yang antusias dan puas dalam menjalankan program mencerminkan motivasi yang tinggi. Pelaksana yang merasa bahwa pekerjaan mereka memiliki dampak positif yang nyata cenderung lebih berkomitmen dan berdedikasi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Dalam konteks program sanitasi jamban sehat, antusiasme dan kepuasan pelaksana memperkuat upaya untuk mencapai tujuan program, yaitu menyediakan fasilitas sanitasi yang layak bagi masyarakat. Dalam kasus Desa Sumorame, sikap pelaksana yang positif terhadap program sanitasi jamban sehat mencerminkan kesadaran mereka akan manfaat program ini dan pentingnya pelaksanaannya yang berhasil. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik, komunikasi yang efektif, dan dukungan yang memadai dari berbagai pihak dapat memperkuat sikap positif pelaksana. Kepala desa dan para pemimpin lain di Desa Sumorame yang mendukung dan memotivasi para pelaksana program turut berkontribusi pada sikap positif ini. Dengan dukungan dan arahan yang jelas, pelaksana program merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik.

F. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Menurut Van Meter and Van Horn (1974) dalam teorinya yaitu teori implementasi kebijakan, menjelaskan bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Ekonomi sendiri dalam teori implementasi kebijakan merupakan suatu kondisi terkait financial seseorang, daerah, maupun negara dan juga tingkat kemakmuran maupun akses yang didapatkan, hal tersebut merupakan aspek-aspek enoekonomi. Kondisi politik merupakan suatu keadaan yang ada di pemerintahan seperti di desa maupun daerah yang dapat dilihat dari kestabilan politik, kebijakan pemerintah, dukungan dari pemimpin setempat maupun masyarakat. Sedangkan kondisi sosial merupakan suatu keadaan sosial yang saling berhubungan satu sama lain seperti halnya nilai budaya, kerukunan masyarakat, dan tingkat partisipasi atau gotong royong masyarakat untuk saling membantu. Dari semua faktor tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang dijalankan. Bapak Mujib Riduwan S. Pd Selaku Kasi Kesra dan Ketua Pelaksana Desa Sumorame mengungkapkan bahwa *"keadaan ekonomi warga di Sumorame menjadi suatu hal yang krusial, sebab hal tersebut menentukan jalannya program sanitasi jamban sehat. Dengan mengetahui keadaan warga setempat serta memberikan dukungan kepada warga yang membutuhkan maka dengan adanya program sanitasi jamban sehat di desa Sumorame bisa dilaksanakan lebih efektif dan berkelanjutan. Dilain sisi untuk keadaan sosial sendiri tidak ada hambatan yang signifikan, tapi Cuma beberapa saja yang bersepekulasi atau merasa tidak manfaat nya, sebab dilain sisi program ini bertahap jadi nanti kedepannya pasti akan bisa menerima manfaat semuanya. Setelah diberikan pemahaman dan informasi yang jelas maka masalah ini bisa dapat diselesaikan dengan baik. Para pemimpin desa maupun para tokoh desa yang berpengaruh di desa Sumorame sangat antusias dan mendukung program ini, dilain sisi pemimpin desa yang proaktif dan berkomitmen mendukung program ini memberikan dorongan moral, motivasi, dan juga logistik yang bisa berdampak positif signifikan. Kepala desa Sumorame juga mengalokasikan dana desa untuk mendukung program ini agar bisa menjadi lebih baik lagi dan dampak positifnya dapat dirasakan masyarakat"* (Wawancara 18 Juli 2024).

Dari wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Sumorame memainkan peran penting dalam mendukung implementasi program sanitasi jamban sehat. Sebagian besar masyarakat desa memiliki tingkat ekonomi yang bervariasi, dengan beberapa keluarga yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk membangun fasilitas sanitasi sendiri. Memahami kondisi ini, program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame dirancang untuk memberikan dukungan yang tepat kepada mereka yang membutuhkan. Dengan adanya pemahaman yang mendalam tentang situasi ekonomi masyarakat, pelaksanaan program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Program ini memastikan bahwa semua warga, terlepas dari kondisi ekonomi mereka, mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Hambatan signifikan dalam implementasi program ini hampir tidak ada. Namun, secara sosial, terdapat sedikit kendala karena program ini dilakukan secara bertahap, yang menimbulkan persepsi ketidakmerataan di antara penerima manfaat. Beberapa warga merasa tidak adil karena mereka belum menerima fasilitas sementara yang lain sudah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa dan tim pelaksana memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses bertahap ini dan pentingnya kesabaran serta kerjasama untuk kesuksesan program. Melalui dialog dan penyuluhan, persepsi ketidakmerataan ini berhasil diatasi dengan baik.

Warga yang awalnya merasa kurang puas akhirnya memahami dan mendukung program tersebut setelah mendapatkan penjelasan yang jelas dan transparan.

Bekerjasama dengan beberapa elemen atau tokoh desa untuk mendukung program ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program sanitasi jamban sehat di desa Sumorame Sidoarjo. Seperti halnya kepala desa yang semangat mendukung dan berkomitmen pada program ini dengan memberikan dorongan moral, motivasi, dan logistik yang bisa berdampak positif signifikan. Pemimpin desa tidak hanya terlibat dalam perencanaan dan pengawasan, tetapi juga aktif dalam memberikan motivasi kepada warga untuk berpartisipasi dalam program ini. Selain itu, kepala desa juga mengalokasikan dana desa untuk mendukung pembangunan fasilitas sanitasi, menunjukkan komitmen finansial yang kuat untuk keberhasilan program. Alokasi dana desa ini mencakup pembelian material, pelatihan tenaga kerja, dan kegiatan sosialisasi. Tokoh masyarakat lainnya juga memainkan peran penting dengan memberikan dukungan moral dan memastikan bahwa program ini diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat. Mereka membantu menyampaikan informasi dan menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan warga, sehingga tercipta kerjasama yang harmonis. Dengan adanya dukungan penuh dari pemimpin desa dan tokoh masyarakat, program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame dapat diimplementasikan dengan lebih lancar dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dukungan ini memastikan bahwa setiap langkah dalam program ini, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, kombinasi antara pemahaman kondisi ekonomi masyarakat, penyelesaian kendala sosial dengan baik, dan dukungan kuat dari pemimpin serta tokoh masyarakat telah menjadikan program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame sebagai inisiatif yang berhasil. Program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong di antara warga desa. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain yang ingin mengimplementasikan program serupa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat mereka.

Fenomena di atas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Dalam hal kondisi ekonomi, pemahaman yang baik tentang situasi ekonomi masyarakat dan penyediaan dukungan finansial yang memadai memungkinkan implementasi program sanitasi jamban sehat berjalan dengan lebih lancar. Meskipun kondisi ekonomi masyarakat mungkin tidak ideal, alokasi dana desa untuk mendukung pembangunan fasilitas sanitasi menunjukkan bahwa ada sumber daya yang cukup untuk mendukung program ini. Kondisi sosial juga memainkan peran penting dalam implementasi program ini. Meskipun ada kendala sosial berupa persepsi ketidakmerataan di antara penerima manfaat, upaya komunikasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah desa berhasil menyelesaikan masalah ini. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif dan keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan. Ketika masyarakat merasa didengarkan dan diberi pemahaman yang jelas, mereka lebih cenderung mendukung program yang sedang diimplementasikan. Kondisi politik di Desa Sumorame juga mendukung keberhasilan program sanitasi jamban sehat. Dukungan dari pemimpin desa yang proaktif dan berkomitmen terhadap program ini merupakan faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Pemimpin yang memberikan dorongan moral dan logistik, serta mengalokasikan dana desa untuk program ini, menunjukkan adanya komitmen politik yang kuat. Stabilitas politik dan dukungan dari pemimpin politik lokal memperkuat upaya implementasi kebijakan dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa program ini adalah prioritas bagi pemerintah desa.

IV. SIMPULAN

Kesimpulannya, penerapan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1974) pada program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame, yang didukung oleh hasil wawancara, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Teori ini mencakup enam variabel utama yang semuanya berperan penting dalam analisis implementasi kebijakan. Variabel pertama, yaitu tujuan dan sasaran kebijakan, menunjukkan bahwa program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebersihan lingkungan. Mengindikasikan bahwa tujuan ini didorong oleh upaya untuk meningkatkan capaian SDGS Desa nomor 6 terkait air bersih dan sanitasi yang sebelumnya kurang maksimal. Kejelasan tujuan ini menjadi landasan bagi keberhasilan program, karena tanpa tujuan yang spesifik, implementasi akan kehilangan arah. Variabel kedua, sumber daya, mencakup aspek finansial, manusia, dan material yang diperlukan untuk menjalankan program. Alokasi anggaran untuk program sanitasi jamban sehat sangat terbatas, sehingga pelaksanaan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Meskipun demikian, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan peralatan yang mencukupi sangat mendukung pelaksanaan program ini. Variabel ketiga, karakteristik agen pelaksana, berfokus pada kemampuan, pengalaman, dan kompetensi pelaksana program. Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi program ini melibatkan kepala desa, tim pelaksana kegiatan, dan perwakilan masyarakat, yang semuanya memiliki peran jelas dan kompeten dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Meskipun tidak ada pelatihan khusus, pengalaman sebelumnya dalam menangani program serupa menunjukkan kompetensi yang memadai. Variabel keempat, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana,

menekankan pentingnya koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi program. Komunikasi yang efektif dilakukan melalui pertemuan berkala dan penggunaan media sosial, yang memastikan semua pihak terlibat dan terinformasi dengan baik. Variabel kelima, sikap dan komitmen pelaksana, adalah kunci lain dalam implementasi kebijakan. Para pelaksana program memiliki pandangan dan komitmen yang kuat terhadap pentingnya sanitasi jamban sehat, serta mendukung program ini karena manfaatnya yang besar bagi masyarakat. Tingkat kepuasan pelaksana terhadap pelaksanaan program juga sangat tinggi. Variabel keenam, kondisi lingkungan, mencakup faktor-faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi implementasi. Dukungan ekonomi masyarakat dan dukungan politik dari pemimpin desa atau tokoh masyarakat sangat positif, meskipun ada sedikit hambatan sosial terkait persepsi ketidakmerataan program. Hambatan ini berhasil diatasi melalui komunikasi yang baik dan pemahaman bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menuntaskan penelitian berjudul "Implementasi Program Sanitasi Jamban Sehat Di Desa Sumorame". Berbagai hambatan yang ditemui selama proses penyusunan dapat dilalui berkat bantuan sertadukungan dari banyak pihak. Peneliti pun menghaturkan terima kasih pada semua informan serta pihak terkait yang sudah meluangkan waktunya, memberikan saran, serta dukungan sehingga kajian ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya.

REFERENSI

- [1] Sulistiono, E., Ningsih, E. S., & Fazira, E. (2021). Implementasi Program Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) pada Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Dukun Kabupaten Gresik. *Jurnal EnviScience (Environment Science)*, 5(1), 1-7.
- [2] Azzarrah, Ilmi Jyhan, and Badrudin Kurniawan. "Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Di Jawa Timur." *Publika* (2021): 573-586.
- [3] Juniar, Midia. "Studi tentang implementasi program sanitasi total dan pemasaran sanitasi (stops) dalam perspektif deliberatif di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik 1.1* (2013): 120-129.
- [4] Rahmuniyati, Merita Eka, and Sri Sahayati. "Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Untuk Mengurangi Kasus Stunting Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Sleman." *Jurnal Kesehatan Masyarakat 5.1* (2021): 80-95.
- [5] Yusuf, L. O., Muchsin, S., & Sekarsari, R. W. (2022). Implementasi Program Jamban Sehat Puskesmas Mojolangu Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Tasikmadu (Studi Kasus Di Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). *Respon Publik*, 16(1), 10-15.
- [6] Nuryadi, R. F., & Kirana, C. A. D. (2023). Implementasi Program Open Defecation Free melalui Penyediaan Jamban Sehat Di Kelurahan Cibabat, Cimahi Utara. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7(1), 125-130.
- [7] Rachmiarti, M. J. (2013). *Studi Tentang Implementasi Program Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (SToPS) dalam Perspektif Deliberatif di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang* (Doctoral dissertation, universitas airangga).
- [8] Wahyuningsih, M. (2016). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Studi Pada Program Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro). *Publika*, 4(3).
- [9] Bedha, M. M. (2024). *Implementasi kebijakan pengurangan fasilitas sanitasi dasar di dinas lingkungan hidup kota surabaya tahun 2023*. PRAJA observer: *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 4(06), 43-54.
- [10] Arring, Oktovianus Duma, and Eko Winarti. "Peran Sanitasi Sehat Dalam Pencegahan Stunting: Tinjauan Literatur Berdasarkan Health Belief Model." *Jurnal Kesehatan Tambusai 5.1* (2024): 656-675.
- [11] Diana, R., Hilman, Y. A., Widiyahseno, B., & Nasution, R. D. (2022). Implementasi Program Open Defecation Free (ODF) untuk Kesehatan Masyarakat. *Wacana Publik*, 16(2), 123-135.
- [12] Rahmayanti, Anita. "Implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang gerakan stop buang air besar sembarangan (stop babs) di kecamatan sungai pandan kabupaten hulu sungai utara (studi kasus di desa banyu tajun hilir, desa tambalang tengah, dan desa rantau karau tengah)." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 3.5* (2024): 2530-2540.

- [13] T. J. van Weert and R. K. Munro, Eds., *Informatics and the Digital Society: Social, ethical and cognitive issues*: IFIP TC3/WG3.1&3.2 Open Conf. on Social, Ethical and Cognitive Issues of Informatics and ICT, July 22-26, 2002, Dortmund, Germany. Boston: Kluwer Academic, 2003.
- [14] Urahmah, N., Ulfah, R., & Riyanor, R. (2022). (Implementasi peraturan daerah kabupaten hulu sungai utara nomor 04 tahun 2016 tentang gerakan stop buang air besar (babs) di kecamatan banjang (studi kasus desa kalintamui, kaludan besar, palanjungan sari). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 849-855.
- [15] Nugraha, Moh Fajar. Dampak Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama (di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang). Diss. Universitas airlangga, 2015.
- [16] Sucahyo, I., Puspitarini, R. C., & Wahyuni, V. N. (2023). The Implementasi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(2), 907-914.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.